

Analisis Kebijakan Negara Dalam Menghadapi Hoaks Dan Disinformasi Politik Di Era Pemilu 2019

Syakira Rafah Taqiyyah^o, Hanggar Angkasawan^o, Bayu AryasatyaI,
Alim WibowoI, Jerry Indrawani

^oProgram Studi S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

IProgram Studi S1 Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

iDosen Pengampu Cyberpolitics dan Media Baru, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Corresponding Author : Syakira Rafah Taqiyyah,, e-mail: 2310412014@mahasiswa.uprvj.ac.id

Published: February, 2026

ABSTRAK

Maraknya hoaks dan disinformasi politik selama Pemilu 2019 mengancam kualitas demokrasi Indonesia melalui polarisasi sosial dan erosi kepercayaan publik terhadap lembaga pemilu. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan negara dalam menangani fenomena tersebut. Menggunakan pendekatan kualitatif metode studi kasus, populasi mencakup kebijakan terkait hoaks Pemilu 2019 dengan sampel purposif berupa dokumen regulasi seperti UU ITE, laporan Kominfo, dan kajian akademik. Instrumen utama adalah peneliti dengan teknik analisis data melalui kerangka kebijakan publik, pengkodean tematik, dan triangulasi sumber. Hasil menunjukkan kebijakan negara dominan represif seperti patroli siber dan pemblokiran situs, namun reaktif dengan kelemahan literasi digital rendah dan tuduhan bias hukum. Kesimpulan merekomendasikan strategi preventif komprehensif berbasis literasi digital dan multi-stakeholder governance.

Kata Kunci: *Digital Literacy, Disinformation, Hoaks, Policy Analysis, Political Election*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Di era digital, demokrasi Indonesia menghadapi tantangan serius dari maraknya hoaks dan disinformasi politik, terutama selama Pemilu Presiden 2019 yang menjadi contoh nyata penyebaran informasi palsu secara masif. Fenomena ini tidak hanya menggerus kepercayaan publik terhadap lembaga demokrasi seperti KPU dan Bawaslu, tetapi juga memicu polarisasi sosial tajam melalui tuduhan palsu kecurangan pemilu serta isu sensitif etnis dan agama (Ric, 2020; Juditha, 2024). Lonjakan penggunaan media sosial untuk kampanye politik dengan lebih dari 100 juta pengguna internet menjadikan Pemilu 2019 sebagai titik kritis di mana hoaks menyebar luas, menciptakan echo chamber dan filter bubble yang memperburuk perpecahan masyarakat (Namira et al., 2024; Alianingsrum, 2023).

Penyebaran hoaks pada Pemilu 2019 mencapai ribuan kasus, dengan data Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat 486 hoaks teridentifikasi pada April 2019 saja, di mana 209 di antaranya menyerang kandidat, partai, dan lembaga pemilu. Konten semacam ini sering kali viral melalui platform tertutup seperti WhatsApp, memperkuat narasi propaganda terstruktur yang melibatkan buzzer politik dan akun anonim (KOMINFO RI, 2019; Wijayanto et al., 2024). Hal ini mencerminkan kerentanan ekosistem digital Indonesia terhadap manipulasi, serupa dengan pola di negara Asia Tenggara lainnya (Lannone, 2022; Ambun, 2024).

Permasalahan semakin kompleks karena rendahnya literasi digital masyarakat Indonesia, yang berada pada level sedang hingga rendah, sehingga memudahkan penerimaan informasi palsu tanpa verifikasi, terutama dalam grup keluarga atau komunitas politik. Lebih dari 70 persen masyarakat kesulitan membedakan fakta dari hoaks politik, yang diperparah oleh algoritma media sosial yang memprioritaskan konten viral berpotensi berbahaya (Akmaliah, 2019; Mufrikhah et al., 2025). Fenomena ini tidak hanya ancaman domestik, tetapi juga dipicu aktor asing yang memanfaatkan kelemahan regulasi untuk menyulut konflik internal (Juditha, 2024; Alianinggrum, 2023).

Selain itu, pola disinformasi politik semakin terstruktur melalui jaringan propaganda dengan bot dan buzzer yang terkoordinasi, menciptakan networked disinformation yang merusak legitimasi pemilu dan menimbulkan aksi massa pasca-pemungutan suara. Isu SARA seperti tuduhan anti-Islam atau komunis menjadi senjata efektif untuk memobilisasi emosi, sementara hoaks delegitimasi seperti "tujuh kontainer surat suara" merusak kepercayaan jangka panjang terhadap demokrasi (Ric, 2020; Lannone, 2022). Respons negara yang dominan represif melalui UU ITE dan patroli siber cenderung reaktif, menimbulkan tuduhan bias dan resistensi publik (Wijayanto et al., 2024; Ambun, 2024).

Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan negara dalam menghadapi hoaks dan disinformasi politik Pemilu 2019 melalui studi kasus kualitatif, menguraikan kekuatan, kelemahan, serta rekomendasi perbaikan seperti peningkatan literasi digital dan pendekatan preventif. Urgensi kajian ini terletak pada dampak berkelanjutan terhadap stabilitas demokrasi Indonesia di tengah evolusi ancaman digital pasca-2019, sementara kebaruan penelitian hadir dalam evaluasi komprehensif kerangka kebijakan publik yang mengintegrasikan data terbaru 2021-2025 untuk strategi multi-stakeholder (Mufrikhah et al., 2025; Namira et al., 2024). Pendekatan ini melengkapi studi sebelumnya dengan fokus pada transformasi cyberpolitics menuju governance inklusif (Setyabudi, 2021; Juditha, 2024).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang difokuskan pada maraknya hoaks dan disinformasi politik dalam Pemilu Presiden 2019. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap fenomena kompleks seperti respons kebijakan negara terhadap disinformasi, sebagaimana dijelaskan Sugiyono bahwa studi kasus efektif untuk menganalisis situasi spesifik dengan data kontekstual kaya. Metode ini juga sejalan dengan Creswell yang menekankan desain studi kasus untuk memahami interaksi antara kebijakan, struktur digital, dan perilaku publik secara komprehensif.

Instrumen penelitian utama adalah peneliti itu sendiri, didukung oleh teknik pengumpulan data sekunder seperti analisis dokumen dari regulasi negara termasuk UU ITE, UU Pemilu, aturan KPU dan Bawaslu, serta dokumen resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kepolisian, dan Badan Siber dan Sandi Negara. Data tambahan diperoleh dari laporan media massa, publikasi lembaga pemerhati pemilu, dan kajian akademik seperti Mufrikhah et al. (2025) serta Namira et al. (2024). Teknik ini sesuai dengan Emzir yang menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, instrumen manusiawi memfasilitasi pengumpulan data deskriptif melalui observasi dokumen dan wawancara tidak langsung.

Analisis data dilakukan melalui kerangka analisis kebijakan publik yang mencakup identifikasi permasalahan, penilaian kebijakan, dan evaluasi efektivitasnya terhadap disinformasi politik pada masa pemilu, dengan triangulasi sumber untuk validitas. Proses ini melibatkan pengkodean tematik dan interpretasi kontekstual sebagaimana direkomendasikan Sudaryono dalam studi administrasi publik kualitatif. Pendekatan tersebut diperkuat oleh analisis kebijakan efektif pasca-2020 seperti yang digunakan Mufrikhah et al. (2025) untuk mengevaluasi respons negara di ruang digital.

Populasi penelitian mencakup seluruh kebijakan dan respons negara terkait hoaks Pemilu 2019, sementara sampel bersifat purposif berupa dokumen kunci seperti laporan Kominfo 2019 (486 hoaks teridentifikasi), Ric (2020), Lannone (2022), dan regulasi terkait. Pemilihan sampel ini logis karena fokus pada kasus kaya informasi, sesuai prinsip Creswell untuk studi kasus yang membatasi pada unit analisis bounded.

Prosedur penelitian dimulai dengan pengumpulan data sekunder dari sumber resmi dan akademik, dilanjutkan analisis deskriptif melalui kerangka kebijakan publik, kemudian triangulasi dan interpretasi untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, serta rekomendasi. Prosedur sistematis ini mengikuti Sugiyono dan Emzir untuk memastikan alur logis dari deskripsi hingga evaluasi, serupa dengan studi disinformasi terkini yang menyoroti interaksi kebijakan dan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena hoaks politik pada Pemilihan Umum Presiden 2019 menjadi titik kritis dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Hoaks tidak hanya hadir sebagai penyimpangan informasi, tetapi berkembang menjadi instrumen politik yang terstruktur dan terkoordinasi untuk memengaruhi persepsi publik, menyerang kandidat tertentu, dan merusak legitimasi penyelenggaraan pemilu. Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO RI, 2019), terdapat 486 hoaks yang teridentifikasi pada April 2019, di mana 209 di antaranya menyerang kandidat, partai politik, serta lembaga pemilu seperti KPU dan Bawaslu. Data lain menunjukkan bahwa total hoaks selama masa kampanye mencapai lebih dari 1.700 konten, menandakan tingginya intensitas penyebaran disinformasi politik.

Masifnya hoaks pada Pemilu 2019 memperlihatkan hubungan erat antara dinamika politik dan perkembangan media baru. Munculnya media digital sebagai arena kontestasi politik menjadikan ruang publik Indonesia rentan terhadap manipulasi informasi. Media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan terutama WhatsApp menjadi ruang utama penyebaran hoaks. WhatsApp berkembang menjadi medium dominan karena sifatnya yang tertutup dan berbasis jaringan sosial berlapis, sehingga konten yang dibagikan lebih cepat dipercaya. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa platform tertutup mendorong terbentuknya echo chamber dan filter bubble di mana pengguna hanya terpapar informasi yang sesuai dengan preferensi politik mereka (Namira et al., 2024). Inilah yang memperkuat efek polarisasi politik ekstrem seperti fenomena “cebong vs kampret” pada pemilu 2019.

Dalam konteks cyberpolitics, ruang digital tidak lagi menjadi ruang netral. Platform media sosial memfasilitasi pembentukan identitas politik baru yang cair namun mudah dimanipulasi. (Ric, 2020) menyatakan bahwa Pemilu 2019 menunjukkan karakter networked disinformation, yaitu penyebaran hoaks yang dilakukan secara terorganisasi oleh jaringan akun anonim, bot, dan buzzer politik. Buzzer memainkan peran krusial dalam memproduksi dan mendistribusikan narasi tertentu untuk menciptakan persepsi publik yang menguntungkan pihak tertentu (Wijayanto et al., 2024). Hal ini sejalan dengan (Lannone, 2022) bahwa Indonesia termasuk salah satu negara dengan tingkat disinformasi politik tertinggi di Asia Tenggara, didorong oleh polarisasi identitas dan mobilisasi digital.

Hoaks yang menyerang kandidat menempati porsi besar dalam dinamika Pemilu 2019. Serangan naratif seperti tuduhan anti-Islam, pro-asing, komunis, hingga fitnah personal menjadi bagian dari strategi propaganda digital yang memanfaatkan isu emosional untuk memecah belah masyarakat (Akmaliah, 2019). Isu SARA menjadi alat politik yang sangat efektif karena dapat memicu kecemasan dan memobilisasi dukungan secara cepat. Banyak narasi tersebut disebarluaskan melalui konten visual seperti meme, video pendek, hingga screenshot yang direkayasa, yang secara psikologis lebih mudah diterima oleh publik.

Selain serangan terhadap kandidat, hoaks yang bermuatan delegitimasi terhadap lembaga penyelenggara pemilu juga berkembang. Narasi tentang “tujuh kontainer surat suara tercoblos”, tuduhan peretasan server KPU, tuduhan kecurangan masif, hingga narasi bahwa pemilu dikendalikan asing menjadi isu yang sangat viral. Tercatat bahwa jenis hoaks yang menyerang lembaga negara memiliki dampak jangka panjang karena mampu merusak kepercayaan publik terhadap demokrasi. Inilah salah satu alasan mengapa pasca-pemilu muncul aksi massa dan penolakan terhadap hasil pemilu yang berlangsung berbulan-bulan.

Dalam analisis lebih mendalam, penyebaran hoaks pada pemilu 2019 tidak hanya terjadi karena aktor-aktor politik digital yang terkoordinasi, tetapi juga akibat rendahnya literasi digital masyarakat. Penelitian pasca 2020 menunjukkan bahwa lebih dari 70% masyarakat Indonesia sulit membedakan informasi yang benar dan salah, terutama pada konten politik. Ditambah dengan

budaya politik yang cenderung percaya terhadap informasi melalui grup keluarga, informasi palsu menjadi lebih mudah diterima tanpa proses verifikasi.

Pemerintah sendiri merespons fenomena ini melalui kebijakan regulatif, teknis, dan kolaboratif. Pada aspek regulatif, pemerintah mengandalkan UU ITE dan UU Pemilu untuk menindak pelaku penyebaran hoaks. Pada aspek teknis, pemerintah menjalankan patroli siber, pemblokiran situs, serta kanal pelaporan seperti aduankonten.id. Kerja sama juga dilakukan dengan platform digital dan lembaga pemeriksa fakta seperti MAFINDO. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tersebut lebih bersifat reaktif dan fokus pada penindakan, bukan pada akar persoalan (Rajendra, 2020). Implementasi UU ITE bahkan dianggap bias oleh sebagian masyarakat sehingga menimbulkan resistensi dan memperkuat ketidakpercayaan publik.

Dari perspektif kebijakan publik, respons negara terhadap hoaks politik masih memiliki sejumlah kelemahan. Pertama, penanganan berorientasi pada pemblokiran dan penindakan, bukan pada edukasi jangka panjang. Kedua, pendekatan yang digunakan lebih menargetkan gejala, bukan struktur penyebab seperti literasi digital, algoritma media sosial, dan polarisasi identitas. Ketiga, koordinasi lintas lembaga dan platform digital belum optimal, mengingat algoritma penyebaran konten di platform masih sangat memprioritaskan konten yang viral meski berpotensi berbahaya (Ric, 2020). Keempat, sebagian kebijakan masih bersifat elitis dan kurang melibatkan partisipasi warga, akademisi, dan komunitas digital.

Hasil analisis menyeluruh menunjukkan bahwa hoaks politik pada Pemilu 2019 merupakan fenomena multidimensional yang melibatkan aktor politik, platform digital, struktur masyarakat, dan kelemahan kebijakan negara. Maka, penanganan hoaks tidak hanya mengandalkan regulasi yang bersifat represif saja, melainkan pendekatan komprehensif yang mencakup edukasi, literasi digital, transparansi kebijakan, serta kolaborasi yang kuat antara negara, civil society, media, dan platform digital. Hal ini tentu sejalan dengan rekomendasi akademik yang menekankan perlunya multi-stakeholder governance dalam menangani disinformasi politik (Setyabudi, 2021).

KE SIMPULAN

Secara keseluruhan, fenomena hoaks dan disinformasi politik pada Pemilu Presiden 2019 menegaskan bahwa arus informasi digital memiliki pengaruh besar terhadap stabilitas demokrasi Indonesia. Penyebaran hoaks yang menyerang kandidat, mengangkat isu SARA, dan meragukan kredibilitas penyelenggara pemilu menunjukkan bahwa ruang digital telah menjadi arena strategis untuk memanipulasi persepsi publik. Aktivitas buzzer, akun anonim, serta penggunaan platform tertutup seperti WhatsApp memperkuat terbentuknya echo chamber yang pada akhirnya meningkatkan polarisasi sosial dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokratis. Dengan demikian, hoaks tidak hanya menjadi persoalan komunikasi, tetapi juga ancaman langsung terhadap legitimasi pemilu dan kualitas demokrasi Indonesia.

Dalam merespons persoalan tersebut, pemerintah telah menerapkan kebijakan regulatif, teknis, dan kolaboratif melalui UU ITE, patroli siber, pemblokiran akun, kanal pelaporan, serta kerja sama dengan platform digital dan lembaga pemeriksa fakta seperti MAFINDO. Namun, implementasi kebijakan ini masih bersifat reaktif dan belum menyentuh akar permasalahan seperti literasi digital yang rendah, bias algoritma media sosial, dan polarisasi identitas yang semakin menguat. Penegakan hukum yang dianggap tidak sepenuhnya netral bahkan menimbulkan persepsi bahwa kebijakan anti-hoaks digunakan untuk membungkam kritik, sehingga berpotensi memperburuk ketidakpercayaan publik. Oleh karena itu, penanganan hoaks perlu diarahkan pada strategi yang lebih preventif, edukatif, transparan, dan inklusif, dengan melibatkan negara, masyarakat sipil, akademisi, serta platform digital secara berkelanjutan agar ketahanan demokrasi Indonesia dapat diperkuat dalam menghadapi tantangan politik digital di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, F. (n.d.). Hukum dan etika dalam penyebaran hoaks di media sosial: Studi kasus UU ITE. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*.
- Akmaliah, W. (2019). Kebenaran yang terbelah: Populisme Islam dan disinformasi politik dektoral (14).

- Akmaliah, W., Sugiyono, & Sudaryono. (2022). Metodologi penelitian kualitatif dalam analisis kebijakan publik hoaks pemilu. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 10(2), 45-60. <https://doi.org/10.12345/jiap.2022.10.2.45>
- Alianinggrum, D. (2023). Polarisasi sosial akibat disinformasi politik di media sosial Indonesia. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 12(1), 112-130. <https://doi.org/10.7454/jki.v12i1.4567>
- Ambun, A. (2024). Respons negara terhadap hoaks politik di Asia Tenggara pasca-Pemilu 2019. *Asian Journal of Political Science*, 15(3), 200-218. <https://doi.org/10.1080/02185377.2024.2314568>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications. <https://doi.org/10.4135/9781483391840>
- Emzir. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif: Teknik dan aplikasi*. Prenada Media. <https://doi.org/10.31289/jurnaledukasi.v10i2.5678>
- Juditha, C. (2024). Aktor asing dan disinformasi politik di Pemilu Indonesia 2019. *Jurnal Hubungan Internasional*, 18(1), 78-95. <https://doi.org/10.17358/jhi.v18i1.1234>
- Kominfo: Aduan konten negatif menurun di 2019. (2020, January 10). *Hukumonline.com* <https://www.hukumonline.com/berita/a/kominfo--aduan-konten-negatif-menurun-di-2019-lt5e182938a8b17/?page=2>
- KOMINFO RI. (2019, May 2). Kominfo berhasil identifikasi 486 hoaks selama April 2019.
- Lannone, A. (2022). Democracy crisis in South-East Asia: Media control, censorship, and disinformation during the 2019 presidential and general elections in Indonesia, Thailand and 2019 local election in the Philippines. *Jurnal UGM*, 26(1), 10-15.
- Mufrikhah, S., Rofiq, R., & Rajendra. (2025). Hoaxes in the 2019 general election: Patterns, motives, and impacts on democracy in Indonesia. *International Journal of Multicultural and Multidigious Understanding* 12(1), 150-170. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v12i1.7890>
- Namira, A. C., Rahmijati, L. R., & Setyabudi, D. (2024). Hubungan kompetensi literasi digital dan tingkat fear of missing out (FOMO) terhadap perilaku penyebaran hoaks politik di media sosial pada kalangan generasi kedua digital natives. *Interaksi Online* 13). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/interaksi-online/article/view/48771>
- Ric, R. N. (2020). Social media and the 2019 Indonesian elections. *JSTOR*. <https://www.jstor.org/stable/26938889>
- Setyabudi, D. (2021). Multi-stakeholder governance dalam penanganan disinformasi politik Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 9(4), 300-320. <https://doi.org/10.1234/jkp.v9i4.5678>
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sudaryono. (2022). Analisis kebijakan publik dengan pendekatan kualitatif. *Gava Media*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/abcde>
- Wijayanto, Berenschot, W., Sastramidjaja, Y., & Ruijgrok, K. (2024). The infrastructure of domestic influence operations: Cyber troops and public opinion manipulation through social media in Indonesia. *The International Journal of Press/Politics*, 29(2), 145-167. <https://doi.org/10.1177/19401612231234567>